

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 19 PERCONTOHAN BANDA ACEH

Oleh:

Sunanto

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Prodi MAP Universitas Syiah Kuala

Email: sunanto75@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan dalam upaya melibatkan seluruh komponen sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendekatannya kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan ketua komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Program kerja disusun oleh tiap komponen sekolah dengan merevisi program kerja tahun yang lalu dan diverifikasi oleh kepala sekolah. Subtansinya mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan namun tidak mencantumkan target hasil secara detail. (2) Pelaksanaan program dikelola oleh tiap komponen sekolah, dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tertulis seperti: Dokumen KTSP, struktur organisasi, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, dan tata tertib sekolah. (3) Evaluasi program lebih terfokus pada program akademik dari pada efektifitas dan efisiensi pembelajaran dan kinerja guru, melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah dan akreditasi sekolah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan kepada pemerintah daerah.

Kata kunci: *Manajemen, bimbingan dan konseling, pembinaan siswa.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai upaya peningkatan mutu telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan antara lain yang paling krusial adalah rendahnya mutu pendidikan. Dari berbagai kajian, ternyata salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah: minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak-anaknya bersekolah.



Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. dan apabila dikaji lebih lanjut beberapa komponen penentu peningkatan mutu sekolah antara lain adalah manajemen pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah salah satu kebijakan dalam peningkatan manajemen sekolah adalah implementasi manajemen berbasis sekolah. Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite sekolah, dewan pendidikan maupun masyarakat secara umum. Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 menyatakan bahwa: pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

MBS merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan.

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa: Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Hal senada dikemukakan juga oleh Irianto (2011:159), bahwa Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kesempatan yang luas bagi *stakeholders* untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam menentukan arah persekolahan.

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa kebijakan untuk melibatkan kelompok kepentingan dalam penyelenggaraan persekolahan, merupakan upaya positif dalam memberdayakan persekolahan.

Hasil observasi awal membuktikan bahwa masih kurangnya partisipasi guru, komite sekolah dan peran serta masyarakat dalam menyusun program perencanaan. Dalam proses pembelajaran guru belum mampu untuk berkreasi, dan evaluasi

program sehingga berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Juga gaya kepemimpinan kepala sekolah yang kurang demokratis dan cenderung memaksakan kehendak. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh”.

1. Pengertian MBS

Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerja sama antara berbagai pihak menjadi model pengelolaan sekolah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah. Mulyasa, (2012:122), mengartikan MBS adalah sebagai Bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam rangka kebijakan pendidikan nasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Rohiat (2010:47) bahwa MBS adalah: Sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas MBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah, dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada untuk meningkatkan mutu sekolah.

Menurut Kustini Hardi (Umiarso&Imam Gojali, 2010:80), penerapan MBS mempunyai tiga tujuan, yaitu: Pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek MBS untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat, Ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.



2. Karakteristik MBS

Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS merupakan wadah/kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Sagala (2011:161) menjelaskan kriteria karakteristik sekolah efektif yaitu sebagai berikut: 1). Memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah) yang diharapkan oleh visi dan misi. 2). Efektifitas proses belajar mengajar yang tinggi. 3). Peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. 4). Lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman. 5). Analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, dan imbalan jasa tenaga kependidikan dan guru. 6). Pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah terhadap keberhasilan program. 7). Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan riil layanan belajar.

3. Pengertian Mutu Pendidikan

Manajemen sekolah dengan rancangan MBS dipandang berhasil jika mampu mengangkat derajat mutu proses dan produk pendidikan dan pembelajaran. Menurut Usman (2013:543) mutu di bidang pendidikan meliputi: *mutu input, proses, output, dan outcome*". Dimana *input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. *Proses* pendidikan yang bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena (1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yaang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, (2) menjamin mutu lulusannya, (3) bekerja lebih profesional, dan (4) meningkatkan persaingan yang sehat.

4. Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan

Setiap sekolah hendaknya menyusun program kerja, baik untuk jangka panjang/ menengah maupun jangka pendek yang disebut dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Penyusunan program kerja sekolah adalah membuat perencanaan program yang

menghasilkan rencana kerja sekolah. Arikunto (2010:4) mendefinisikan program adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Perencanaan program pada dasarnya adalah proses penetapan kegiatan di masa yang akan datang, dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Handoko (Usman, 2013:77), Perencanaan meliputi: (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan rencana kerja sekolah. Beberapa langkah yang mesti ditempuh dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana Depdiknas (2010:5) memberi petunjuk bahwa kegiatan tim

kerja sekolah mencakup: Pengumpulan bahan/data dan penyusunan draf Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM); Pembahasan dan Reviu draf RKJM; Finalisasi hasil revisi RKJM; Penandatanganan dokumen RKJM; Penyusunan draf Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); Pembahasan dan reviu draf Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); Finalisasi hasil reviu RKAS; dan Penandatanganan dokumen RKAS.

5. Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Konsekuensi dari implementasi MBS tersebut, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menjadi semakin besar. Kepala sekolah harus bisa memimpin dan memberdayakan semua sumber daya sekolah. Kepala sekolah merupakan motor penggerak dan penentu arah kebijakan sekolah. Sehubungan dengan peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, Mulyasa (2011:126) mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen berbasis sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut: 1). Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik, lancar dan produktif. 2). Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 3). Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 4). Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan



pegawai lain di sekolah. 5). Bekerja sama dengan tim secara kooperatif. 6). Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Danim dan Khairil (2012:79) dalam rangka menjalankan fungsinya, kepala sekolah harus memerankan diri dalam tatanan perilaku sebagai “*educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan entrepreneur* yang disingkat EMASLIME.”

6. Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Dengan tersusunnya program sekolah secara bersama oleh seluruh warga sekolah, diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Depdiknas (2008:112) menetapkan prosedur/langkah-langkah kegiatan yang dapat mewujudkan program sekolah yang telah disusun: 1). Mensosialisasikan program sekolah kepada guru, pegawai sekolah, siswa dan orang tua siswa melalui pertemuan formal, rapat kerja sekolah. 2). Menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi keuangan sekolah dan sumber daya manusia yang ada di sekolah. 3). Pembagian tugas kepada setiap pelaksana atau penanggungjawab program berdasarkan potensi /kemampuan masing-masing yang akan dilaksanakan. 4). Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan dalam rangka memantau tercapainya target/sasaran. 5). Membuat laporan tentang keterlaksanaan program sekolah, sekaligus membuat catatan-catatan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah tersebut dan menentukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 6). Menyusun program tindak lanjut dalam hubungan dengan program sekolah yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program sekolah, menurut Sagala (2011:157) perlu menerapkan prinsip-prinsip tata sekolah yang baik, yaitu: “partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan kedepan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktibilitas, kepekaan, profesionalisme, efektivitas, efisiensi, dan kepastian jaminan hukum”. Berarti sekolah merupakan suatu sistem dengan unsur saling terkait dan kolektif.

7. Evaluasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Ada perbedaan antara evaluasi dengan evaluasi program. Menurut Arikunto (2010:2), evaluasi adalah “kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan”. Sedangkan menyangkut evaluasi program, Arikunto (2010:18) mengatakan bahwa evaluasi program adalah “upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya”. Sedangkan monitoring dilakukan selama pelaksanaan program sebagaimana telah dijelaskan, namun sering digabung dengan evaluasi program. Berkaitan dengan supervisi pendidikan, Arikunto (2010:21) mengatakan dalam satuan pendidikan: Evaluasi program dapat disamakan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang tepat pula.

B. PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena salah satu bentuk metode yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati permasalahan dan memberi jawaban. Sugiyono (2010:8), metode penelitian kualitatif adalah: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah.(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 12 September sampai dengan 12 Desember 2013.

2. Subyek Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh.



Semua komponen ini berpengaruh terhadap penerapan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan.

3. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2009:372) dan Moleong (2007:330) menjelaskan bahwa: kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas merupakan persoalan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Kemudian dilanjutkan, Sugiyono (2009:332-372) dan Moleong (2007:330-376), “untuk mencapai kredibilitas dilakukan triangulasi, peer-debriefing (diskusi sesama kolega), penggunaan bahan referensi, dan mengadakan member check”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, Satori dan Komariah (2010:25) mengemukakan bahwa: “Pengumpulan data penelitian kualitatif yang sah dipersyaratkan yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan triangulasi.

5. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan cara mengikuti prosedur sebagaimana yang disarankan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2009:246), “dengan langkah-langkah, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

C. HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Diawali dengan rapat pembentukan Tim Pengembang Sekolah. Dalam semua kegiatan perencanaan program peningkatan mutu pendidikan mengacu dan memenuhi delapan SNP. Selain itu, memperhatikan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Kegiatan pertama Tim adalah menyusun Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. Perumusannya berdasarkan masukan dari internal warga sekolah dan rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.

2. Pelaksanaan Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Melakukan koordinasi dengan membuat dan menyediakan beberapa pedoman tertulis. Pedoman tersebut meliputi: Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan dan



Anggaran Sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kalender pendidikan/ akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, dan sejumlah dokumen menyangkut regulasi di bidang pendidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sedangkan yang lain dievaluasi sesuai kebutuhan.

3. Evaluasi Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Membentuk tim supervisi kelas untuk melakukan supervisi kelas mengenai proses pembelajaran. Dilaksanakan dua kali dalam satu semester, secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan oleh pengawas sekolah belum semua guru dan semua aspek komponen sekolah mendapat pembinaan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan belum melaksanakan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.

D. PEMBAHASAN

1. Perencanaan Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Perencanaan program dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah sudah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, terutama dewan guru dan komite sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah sudah berkontribusi untuk memberikan masukan. Begitu juga, dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan termasuk RKT, dan RKAS, seluruh tim pengembang sekolah sudah berpartisipasi aktif.

Danim (2007:108) mengatakan bahwa: pekerjaan pertama kepala sekolah dalam menerapkan MBS adalah meyakinkan sebanyak mungkin guru bahwa mereka mempunyai kewajiban, kesempatan, dan tantangan untuk terlibat dalam aneka bentuk perencanaan dan pemecahan masalah yang sampai sekarang dikerjakan oleh administrator.

Dengan demikian, mereka yang terlibat (terutama para guru) diharapkan dapat mengetahui bagaimana kebijakan sekolah dan tumbuh rasa tujuan sekolah yang tertulis di dinding sekolah sudah menunjukkan berjalannya usaha sosialisasi kepada warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pelaksanaan Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Sekolah sudah melakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui pembagian tugas pada komponen satuan pendidikan. Kemudian membuat dan memiliki beberapa pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis termasuk peraturan akademik, struktur organisasi dan uraian tugas staf tiap komponen sekolah. Namun, pedoman-pedoman dan informasi sekolah tersebut tak mudah diakses oleh publik. Berbagai pedoman tersebut seharusnya mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini, sesuai dengan prinsip transparansi MBS.

Menurut Mulyasa, (2009:130), “transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah”. Sedangkan dalam konteks pendidikan, istilah transparansi menurut Depdiknas (2006:14) yaitu “kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah”.

3. Evaluasi Program dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Sekolah membentuk tim guru piket harian yang bertugas untuk mengawasi terutama kedisiplinan kehadiran siswa dan guru, agar program kerja, dan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara tertib. Evaluasi program kerja sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan oleh badan akreditasi. Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah terhadap SNP dilakukan sendiri oleh kepala sekolah dan belum menjadi budaya menyeluruh di sekolah ini. Evaluasi program sekolah secara interen lebih banyak difokuskan kepada ketercapaian program pembelajaran atau hasil belajar siswa dan belum melihat kepada efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan kinerja guru. Akuntabilitas pelaksanaan program lemah. Pertanggungjawaban kegiatan dan biaya pelaksanaan program disampaikan kepada pemberi dana berupa laporan tertulis, sedangkan kepada dewan guru hanya disampaikan secara lisan dan secara umum dalam rapat yang dihadiri ketua komite sekolah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perencanaan program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19



Percontohan Banda Aceh, berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah dan membuat analisis SWOT. Kemudian menyusun Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Dokumen RKS sudah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun dan sudah berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai serta perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun, dalam penyusunan RKAS belum dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis dengan tidak melibatkan seluruh stakeholder juga komite sekolah.

- b. Pelaksanaan program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, tim pengembang kurikulum sekolah telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan tertulis seperti: dokumen KTSP, struktur organisasi, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, peraturan akademik, dan tata tertib sekolah. Semua guru memiliki persiapan berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, dan RPP. Penyusunan perangkat pembelajaran mengacu kepada Standar Proses dari SNP. Guru sudah menerapkan pendekatan pembelajaran CTL. Komite sekolah dan orangtua siswa belum terlibat dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Evaluasi program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun. Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah membentuk tim supervisi melibatkan pihak internal sekolah terutama guru. Pihak eksternal yang terlibat untuk melakukan evaluasi adalah pengawas sekolah dan Asesor dari Badan Akreditasi Propinsi. Hasil evaluasi pelaksanaan program dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan.

2. Saran-saran

- a. Perencanaan program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, tim pengembang sekolah hendaknya bekerja lebih fokus dengan melakukan analisis SWOT dengan berpedoman kepada Implementasi Kurikulum 2013. Kepala sekolah juga harus dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terutama dengan komite sekolah dan mau menerima masukan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- b. Pelaksanaan program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19



Percontohan Banda Aceh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum harus lebih memperhatikan perkembangan proses pembelajaran dan memahami sasaran kurikulum. Secara personal maupun institusi, seharusnya Dinas Pendidikan perlu melakukan penataan ulang penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan supaya ada kesesuaian dengan rencana proses pembelajaran.

- c. Evaluasi program dalam peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, Kepala Sekolah perlu melakukan evaluasi kinerja berupa uji kompetensi bagi seluruh guru secara komprehensif, terprogram, dan berkelanjutan, diperlukan studi lanjutan untuk mengetahui dalam berbagai aspek lainnya terkait implementasi MBS dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto dan Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Danim Sudarwan dan Khairil. (2012). *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto. (2011). *Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran* Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas. (2010). *Juknis Penyusunan Rencana Kerja SMA*. Jakarta; Direktorat Pembinaan SMA.
- Depdiknas. (2008b). *Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah, Manajemen Pengembangan dan Implementasi KTSP*. Jakarta: DirJen.PMPTK
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harun, Cut Zahri. (2009). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Yogyakarta : Pena Persada.
- Imron, Ali. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idris, Jamaluddin. (2005). *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*. Yogyakarta : Suluh
- Komariah Aan dan Triatna Cepi. (2010). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murniati, AR (2008). *Manajemen Stratejik Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan*. Bandung: Remaja Citapustaka Media Perintis.
- Mulyasa, E. (2010). *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J.L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RosdaKarya.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohiat. (2009). *Manajemen Sekolah- Teori Dasar Dan Praktik*. Bandung:Refika.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Satori dan Komariah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sagala, Syaiful. (2011). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyosumidjo. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU No. 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta .
- Umiarso dan Gojali Imam. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Usman, Husaini. (2013). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>.

